



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan barang dan jasa kepada publik disebut *governance* (kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari kolusi dan korupsi. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada semua tingkatan yang melaksanakan kegiatan. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan itu telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diikuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dan dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kota

Lhokseumawe selama Tahun 2017, Pemerintah Kota Lhokseumawe menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2017.

Kota Lhokseumawe dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe dengan Ibukota Lhokseumawe. Berikut ini diuraikan gambaran umum Kota Lhokseumawe meliputi kondisi geografis, potensi ekonomi, sumber daya manusia, struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan LKj IP, dan sistematika penyajian LKj IP.

### **1.1 KONDISI GEOGRAFIS**

Letak geografis Kota Lhokseumawe antara 04<sup>0</sup> – 54<sup>0</sup> Lintang Utara dan Lintang 05<sup>0</sup> - 18<sup>0</sup> Selatan serta 96<sup>0</sup> – 20<sup>0</sup> dan 97<sup>0</sup> – 21<sup>0</sup> Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 13 meter, dengan luas wilayah 181,06 km<sup>2</sup>. Dilihat dari letaknya, Kota Lhokseumawe Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Kuta Makmur), Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Dewantara), dan sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Syamtalira Bayu). Dengan kedudukan ini, Kota Lhokseumawe berjarak kira-kira 275 Km dan dapat ditempuh selama 6 jam dengan perjalanan darat dari pusat pemerintahan Provinsi Aceh (Kota Banda Aceh). Adapun wilayah administrasi Kota Lhokseumawe meliputi 4 (empat) kecamatan, 9 (sembilan) kemukiman, dan 68 (enam puluh delapan) desa/gampong serta 259 dusun, Luas dan persentase untuk tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Lhokseumawe**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas ( Km<sup>2</sup> )</b>	<b>Persentase ( % )</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Muara Dua	57,80	31,92
2.	Blang Mangat	56,12	31,00
3.	Banda Sakti	11,24	6,21
4.	Muara Satu	55,90	30,87
<b>JUMLAH</b>		<b>181,06</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Lhokseumawe dalam Angka Tahun 2017*

Dari luas wilayah tersebut penggunaan lahan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2

**Tabel 1.2**  
**Jenis Penggunaan Lahan Wilayah Kecamatan di Lhokseumawe**

No	Jenis Penggunaan Lahan	LUAS ( Ha )	PERSENTASE ( % )
1	2	3	4
1.	Lahan Pemukiman	10.877	60
2.	Industri Pabrik	894	5
3.	Persawahan	3.747	21
4.	Pertanian Lahan Semusim	308	2
5.	Perkebunan rakyat	749	4
6.	Alang-alang	191	1
7.	Hutan Belukar	587	3
8.	Perairan Darat	626	3
9.	Lain-lain	127	1
<b>JUMLAH</b>		<b>18.106</b>	<b>100</b>

*Sumber : Lhokseumawe dalam Angka Tahun 2017*

## **1.2 TINJAUAN EKONOMI**

---

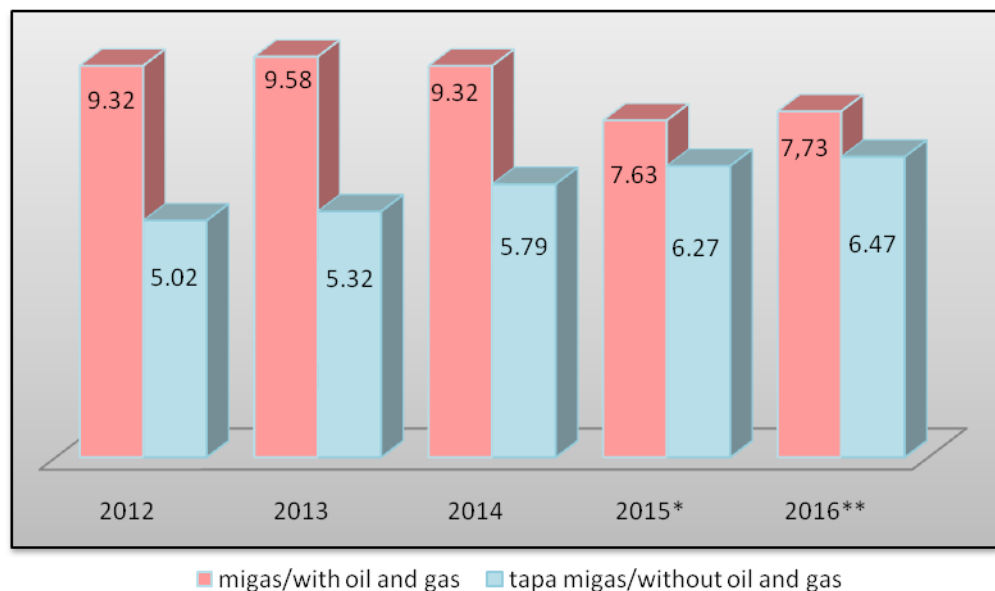
### **1.2.1 Nilai PDRB**

PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat menggambarkan aktivitas ekonomi secara menyeluruh pada suatu daerah. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk tiap tahun, aktivitas ekonomi juga semakin meningkat, sehingga mengakibatkan peningkatan pula pada nilai PDRB ADHB secara kontinu dari tahun ke tahun.

PDRB ADHB dengan migas Kota Lhokseumawe selama lima tahun terakhir mengalami pergerakan naik turun tiap tahunnya. Tahun 2016, nilainya mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,10 triliun rupiah, dari 7,63 triliun rupiah

menjadi 7,73 triliun rupiah dibandingkan tahun 2015. Sebelumnya, selama tahun 2013-2015 PDRB ADHB dengan migas mengalami kecenderungan penurunan. Tahun 2015, nilainya anjok sebesar 1,69 triliun rupiah dibandingkan tahun 2014. Penurunan PDRB ADHB tahun 2014 mencapai 0,26 triliun rupiah dibandingkan tahun 2013.

**Gambar PDRB ADHB Lhokseumawe, 2011-2015 (triliun rupiah)/**  
*Figure Lhokseumawe GRDP at Current Markes Prices, 2012-2016*  
(trillion rupiahs)



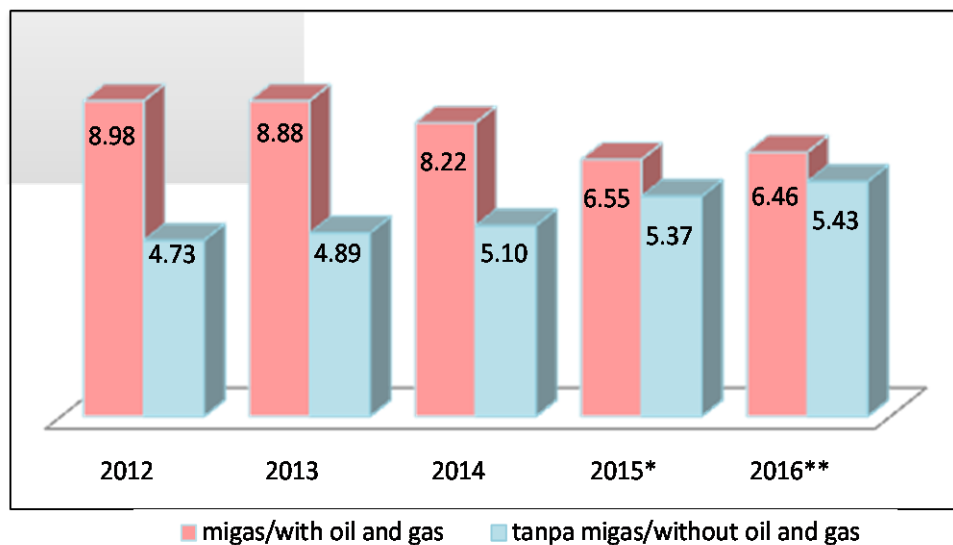
Berbeda dengan PDRB memperhitungkan migas, PDRB ADHB tanpa memperhitungkan migas selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,36 triliun rupiah per tahun. PDRB ADHB tahun 2016 mencapai 6,47 triliun rupiah. Nilai ini meningkat sebesar 0,20 triliun rupiah dari tahun 2015. Tahun sebelumnya, PDRB ADHB 2012-2015 mengalami peningkatan dari 5,02 menjadi 6,27 triliun rupiah.

Nilai PDRB dengan mengabaikan faktor harga menunjukkan nilai PDRB secara riil yang secara umum disebut sebagai PDRB ADHK. Peningkatan yang kontinu menunjukkan produktivitas yang terus meningkat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB ADHK dengan migas mengalami penurunan

2,52 triliun rupiah dari 8,98 triliun rupiah ditahun 2012 menjadi 6,46 triliun rupiah di tahun 2016.

Sedangkan nilai PDRB ADHK tanpa mengikutkan migas pada tahun 2012-2016 mengalami peningkatan rata-rata 0,18 triliun rupiah tiap tahunnya, dengan nilai 5,43 triliun rupiah tahun 2016 atau meningkat 0.70 triliun dari tahun 2012.

**Gambar PDRB ADHB Lhokseumawe, 2012-2016 (triliun rupiah)/**  
*Figure Lhokseumawe GRDP at 2010 Current Markes Prices, 2012-2016*  
*(trillion rupiahs)*



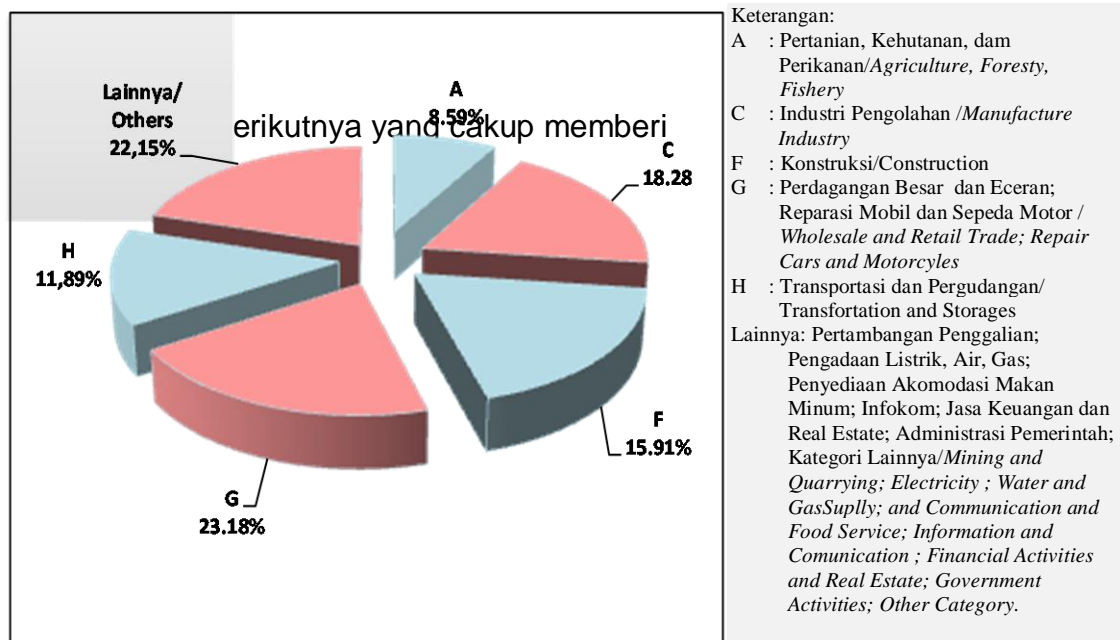
Selama 5 tahun terakhir (2012-2016) terlihat bahwa rata-rata perunahna PDRB ADHB cenderung lebih besar daripada perubahan kenaikan PDRB ADHK. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan karena harga lebih dominan daripada kenaikan karena produktivitas.

### **1.2.2 Struktur Ekonomi**

Sejak tahun 2015, struktur ekonomi Kota Lhokseumawe didominasi oleh katagori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan kategori ini meningkat dari 15,76 persen di tahun 2012 menjadi 23,18 persen di tahun 2016.

Kategori dengan peranan kedua terbesar adalah industri pengolahan sebesar 18,28 persen. Kategori ini mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 47,40 persen. Kategori konstruksi menempati urutan ketiga dengan peranan sebesar 15,91 persen. Kategori ini mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 9,31 persen.

**Gambar Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe Dengan Migas 2016 (persen)**  
*Figure Lhokseumawe Percentage Distribution Of GRDP at Current Market Prices with Oil and Gas, 2016 (Percent)*



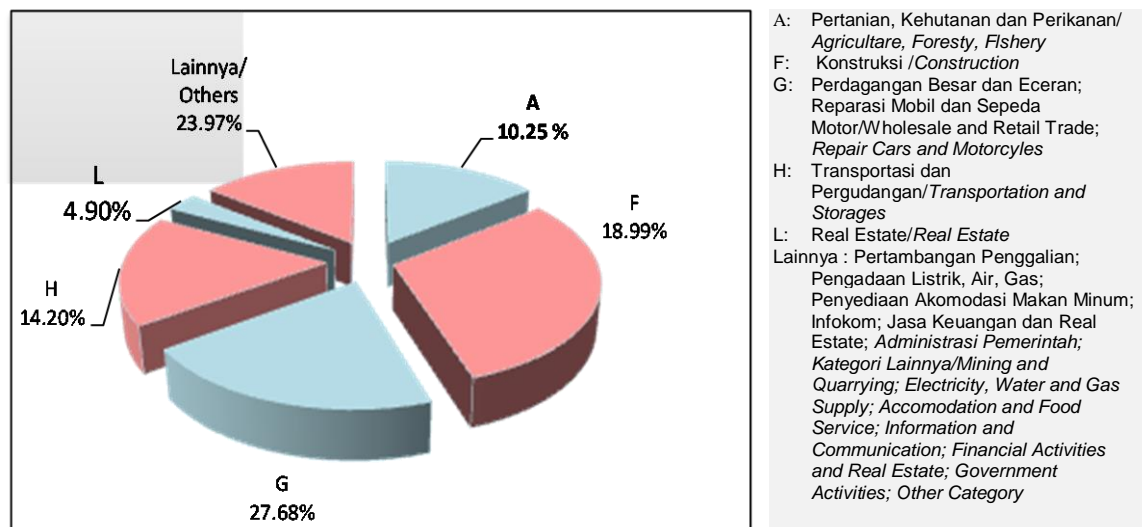
konstruksi yaitu kategori Transportasi dan Pergudangan serta Kategori Pertanian. Dengan kontribusi kategori Transportasi dan Pergudangan berada pada angka 11,89 persen dan kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 8,59 Persen.

Jika dipisahkan industri migas dari PDRB maka semakin terlihat lah bahwa kategori yang dominan di Lhokseumawe yaitu kategori perdagangan, disusul konstruksi, dan transportasi.

Di 2016 dapat kita lihat bahwa kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberi sumbangsih mencapai 27,68 persen, lalu kategori Konstruksi mencapai 18,99 persen, kategori Transportasi dan Perundangan mencapai 14,20 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan bahkan muncuk dengan share sebesar 10,25 persen dan kategori real estate mencapai 4,90 persen.

**Gambar Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe Tanpa Migas 2016 (persen)**

*Figure Lhokseu mawe Percentage Distribution Of GRDP at Current Market Prices without Oil and Gas, 2016 (Percent)*



### **1.3 ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS**

Bab isu-isu strategis merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam dokumen RPJMD ini. Isu strategis ini akan menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Butir-butir penting di bawah ini akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu strategis mencakup permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan Kota Lhokseumawe.

### **1.3.1 Isu- Isu Strategis Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017**

Isu strategis pembangunan Kota Lhokseumawe yang terkait dengan isu strategis tata kelola pemerintahan, isu strategis pelaksanaan nilai-nilai dinul Islam, isu strategis infrastruktur dan tata ruang, isu strategis ekonomi, isu strategis kesehatan dan isu strategis pendidikan, secara rinci diuraikan sebagai berikut :

#### **1.3.1.1 Isu Strategis tata Kelola Pemerintahan**

Didukung oleh institusi penunjang yang mengakomodasi reformasi birokrasi yaitu pembaharuan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Penyempurnaan kebijakan di bidang aparatur akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, manajemen pemerintahan dan manajemen SDM aparatur yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi. Implementasi hal-hal tersebut pada masing-masing SKPD akan mendorong perubahan *mind set* dan *culture set* pada setiap birokrat ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel.

Setiap perubahan diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-program pembangunan bagi masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat, produktivitas aparatur meningkat, kesejahteraan pegawai meningkat, dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan seluruh masyarakat. Secara bertahap, upaya tersebut diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam upaya perwujudan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) menuju terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Kondisi ini akan menjadi profil birokrasi yang diharapkan. Kondisi tersebut di atas akan dicapai melalui berbagai upaya, antara lain melalui suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai sehingga bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan meningkatkan kepercayaan instansi untuk melakukan sesuatu perubahan yang signifikan.

Penyelesaian sesuatu yang signifikan merupakan inti dari suatu perubahan yang dapat dimulai melalui tahap-tahap penataan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan penataan budaya kerja aparatur.

#### **1.3.1.2 Isu Strategis Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam**

Isu strategis dalam pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam lebih ditekankan pada pemahaman. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Dinul Islam itu sendiri sehingga dapat membendung dan menyaring kemajuan teknologi maupun budaya luar yang masuk ke Aceh khususnya Kota Lhokseumawe. Pemahaman dan pengamalan agama dikalangan para pendidik juga perlu ditekankan agar dapat memberikan ilmu dan arahan pada generasi muda dalam menghadapi derasnya arus globalisasi.

#### **1.3.1.3 Isu Strategis Bidang Ekonomi**

Isu strategis ekonomi terkait dengan ketenagakerjaan, koperasi dan UMKM, rendahnya peran swasta dalam pembangunan/ investor, pertanian, perdagangan, industri, kemiskinan, pariwisata, kelautan dan perikanan serta industri serta perubahan orientasi sektor basis ekonomi. Masing-masing sub dijelaskan sebagai berikut.

##### **a. Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan di Kota Lhokseumawe memiliki dinamika yang menarik untuk diketahui. Secara umum, ada empat hal penting yang menjadi perhatian:

- Penanggulangan kemiskinan dengan implementasi gotong royong dan swadaya masyarakat

Penanggulangan kemiskinan dengan implementasi nilai-nilai gotong royong dan swadaya masyarakat juga masih hangat untuk didiskusikan. Beberapa program penanggulangan kemiskinan terus dilakukan, diantaranya: PNPM Mandiri Perkotaan dan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan di tingkat Gampong.

Hal tersebut ditujukan agar angka kemiskinan mengalami penurunan dengan basis standar ambang kemiskinan yang lebih tinggi. Selain itu, ada pemikiran yang juga menarik untuk dikaji, yaitu upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur keagamaan.

- Peningkatan daya saing tenaga kerja berpendidikan tinggi.

Kota Lhokseumawe, sebagai salah satu pusat pendidikan pada wilayah timur Aceh, mencetak ratusan lulusan berpendidikan tinggi setiap tahunnya. Namun, nampaknya lulusan tersebut masih berorientasi untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini, daya saing tenaga kerja berpendidikan tinggi perlu ditingkatkan.

- Peningkatan kesadaran wirausaha bagi para sarjana oleh lembaga akademik.

Selain itu, peningkatan kesadaran wirausaha bagi para sarjana perlu dilakukan oleh lembaga akademik. Karena kewirausahaan tidak hanya cukup diperoleh dari sejumlah teori, para mahasiswa dan pelajar perlu diberikan pelatihan ketrampilan khusus agar siap terjun ke dunia bisnis yang sebenarnya.

#### **b. Koperasi dan UMKM**

Pengembangan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi, termasuk menyediakan keperluan barang dan jasa suatu daerah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Kota Lhokseumawe meliputi:

- Pemberdayaan pelaku UMKM–K melalui cara yang lebih kreatif;
- Menciptakan peluang usaha bagi masyarakat lokal berbasis komunitas kewilayahan (*community based*); dan
- Meningkatkan kerjasama antara UMKM dan perusahaan korporasi swasta maupun milik pemerintah.

Selanjutnya, solusi yang kreatif dapat berhasil jika pelatihan yang diberikan pada para pelaku tepat sasaran. Tepat sasaran yang dimaksud dapat didasarkan pada bakat dan kebutuhan jenis keterampilan yang dibutuhkan. Peluang juga muncul dalam penciptaan

peluang usaha bagi masyarakat lokal berbasis komunitas kewilayahan (*community based*). Misalnya, penggalakan pengembangan pengrajin bordir. Selain itu, peningkatan kerjasama antara UMKM dan perusahaan korporasi swasta maupun milik pemerintah perlu dilanjutkan.

**c. Rendahnya Peran Swasta Dalam Pembangunan/ Investasi**

Modal merupakan faktor produksi yang krusial dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah. Semakin besar akumulasi modal yang ada, kegiatan ekonomi akan dapat memproduksi *output* pada tingkat yang lebih tinggi.

**d. Pertanian**

Masih cukup banyak lahan non-produktif; rendahnya produktivitas dan mutu hasil pertanian; rendahnya daya saing produksi pertanian; belum optimalnya penanganan teknologi tepat guna, efisiensi dan ramah lingkungan; rendahnya SDM terdidik di bidang pertanian; ekstensifikasi pertanian dan distribusi hasil pertanian belum efisien; penanganan panen dan pasca panen yang belum dilakukan akibat kurangnya penggunaan teknologi pengelolaan pertanian; rendahnya budaya dan perilaku masyarakat petani yang tidak mandiri, produktif, kreatif dan inovatif dalam pengelolaan dana investasi pertanian; rendahnya permodalan petani; belum optimalnya pengadaan sarana infrastruktur dan pemanfaatan/ pengolahan hasil produksi dari Kab/ Kota sekitar Kota Lhokseumawe; keterbatasan akses pasar dan jaminan ketersediaan pupuk.

**e. Perdagangan**

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yaitu terdiri dari perdagangan, hotel dan restoran memberi kontribusi terhadap PDRB dengan migas. Dengan meningkatkan perlindungan konsumen dan kualitas produk serta meningkatkan kesadaran pedagang yang didukung oleh pemerintah dalam mengakses pasar akan lebih meningkatkan daya saing produk sehingga diharapkan kedepan kontribusi perdagangan terhadap PDRB dapat meningkat dengan mengoptimalkan sektor perdagangan dan

memanfaatkan potensi wilayah *hinterland* serta status Kota Lhokseumawe sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

**f. Industri**

- Pengembangan industri jasa berkaitan dengan industri hiburan dan rekreasi serta industri perseorangan dan rumah tangga. Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan pengembangan industri jasa perseorangan dan rumah tangga perlu dikembangkan untuk dapat seluas-luasnya memberikan akses berusaha. Selama ini industri jasa perseorangan dan rumah tangga yang berkembang adalah jasa kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan khususnya Perguruan Tinggi;
- Pengembangan sektor industri potensial berkembang ke arah industri kreatif, yaitu industri yang berkaitan dengan gaya hidup. Pengembangan industri kreatif dapat berupa kegiatan industri dengan skala rumah tangga, dan akan berjalan baik apabila dilakukan dengan adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara usaha skala kecil dan besar;
- Pemberdayaan pelaku industri kreatif melalui pelatihan yang terfokus dan terukur. Melakukan atau menyelenggarakan pelatihan dengan tema yang spesifik sehingga dapat memenuhi kebutuhan di pasar tenaga kerja. Hal ini mengingat industri kreatif memerlukan tingkat pemahaman dan ketrampilan yang cukup tinggi terkait dengan proses produksinya. Profesionalisme dan kehandalan tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk menciptakan produk yang memiliki unsur kreatifitas sekaligus nilai ekonomi yang tinggi;
- Penerapan teknologi industri dan sumber daya manusia (*skill*) dapat meningkatkan produk yang lebih inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi sehingga mampu menembus pasar baik nasional maupun internasional;
- Perlunya pemahaman dan pengetahuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual akan mempermudah produsen dalam memasarkan produk-produknya karena adanya perlindungan produsen terhadap hasil karya

baik Hak Cipta, *Forklof*, inovasi teknologi, merek dan rahasia dagang sehingga produsen lebih merasakan keuntungan dari hasil karyanya melalui perlindungan tersebut;

- Penyaluran kredit lunak dari perbankan terhadap permodalan bagi pengusaha industri dapat dipermudah sehingga para pengusaha dapat lebih meningkatkan usahanya.

**g. Kemiskinan**

Isu strategis kemiskinan meliputi isu Penurunan Angka Kemiskinan secara signifikan, belum adanya dokumen Standard Penduduk Miskin atau indikator kemiskinan Kota Lhokseumawe, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, mental keagamaan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, peran serta penduduk yang mampu untuk mengatasi kemiskinan dan perlunya kader-kader untuk pengentasan kemiskinan.

**h. Perubahan Orientasi Sektor Basis Ekonomi**

Sektor yang menjadi basis utama ekonomi Kota Lhokseumawe selama beberapa dasawarsa bertumpu pada sektor migas. Dalam perkembangan beberapa tahun kebelakang, sektor migas ini mengalami penurunan produksi yang berdampak pada penurunan ekonomi (*economic slow down*). Sehingga perlu dilakukan perubahan orientasi sektor basis ekonomi dari sektor migas ke sektor non migas yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

**1.3.1.4 Isu Strategis Pendidikan**

Isu strategis pendidikan meliputi bantuan pendidikan (BOS dan Beasiswa, peningkatan pemerataan mutu pendidikan formal, non formal dan informal menjadi sangat penting, kuantitas dan kualitas guru serta sarana dan prasarana pendidikan berikut ini :

**a. Bantuan Pendidikan (BOS dan Beasiswa)**

Lhokseumawe sebagai kota pendidikan telah melewati wajib belajar 9 tahun bahkan sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun. Kesempatan belajar

tidak hanya menjadi hak bagi usia sekolah tetapi terbuka bagi seluruh warga yang ingin meningkatkan pendidikan dan pengetahuannya. Untuk itu perlu dilakukan pendistribusian yang tepat sasaran secara merata dana BOS dan Beasiswa sehingga anak didik dapat merasakan bantuan tersebut.

**b. Peningkatan pemerataan mutu pendidikan formal, non formal dan informal**

Peningkatan mutu ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kurikulum, sumber daya manusia, sarana prasarana dan iklim yang kondusif, dan penguasaan teknologi dan informasi dalam rangka mewujudkan hasil pendidikan berdaya saing tinggi. Sehingga pemerataan kualitas sekolah dapat memenuhi pendistribusian siswa ke masing-masing sekolah. Perubahan kurikulum Nasional pada tahun 2013 diharapkan berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan secara umum dan terintegrasi antar jenjang pendidikan.

**c. Kualitas dan kuantitas Guru**

Pendistribusian dan penempatan guru yang belum merata dapat dilakukan dengan melalui penyeleksian tenaga pendidik yang sesuai dengan disiplin ilmunya sehingga rasio guru terhadap murid dapat seimbang.

**d. Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi syarat/ standar prasarana pendidikan dan SPM pendidikan juga belum tersedia. Kedepannya akan dilakukan database kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan Kota Lhokseumawe.

**1.3.1.4 Isu Strategis Kesehatan**

Isu Strategis Kesehatan perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, kualitas tenaga kesehatan berikut ini, meliputi :

**a. Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan**

Sarana dan prasarana kesehatan belum memenuhi syarat/ standar prasarana kesehatan. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga mereka pasien merasa nyaman untuk berobat. Standar Pelayanan Minimal kesehatan merupakan standar pelayanan publik untuk menjamin minimum pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh masyarakat dari Pemerintah. Puskesmas sebagai salah satu institusi fasilitas Pemerintah Daerah dan sebagai lini terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan non-profit kepada masyarakat dan merupakan ujung tombak dalam sistem kesehatan Nasional, maka Kota Lhokseumawe menjadikan salah satu Puskesmas untuk menaikkan statusnya menjadi Rumah sakit tipe D sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik berdasarkan wewenang tugas pokok dan fungsinya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, masalah dan kemampuan Puskesmas tersebut.

Masalah globalisasi kesehatan membawa konsekuensi, yaitu kompetensi pelayanan kesehatan pemerintah akan terdesak oleh investasi swasta dan minimal membentuk persepsi masyarakat tentang pelayanan yang layak diterima. Akibat dari tuntutan masyarakat tersebut, profesionalisme pelayanan semakin dipacu tetapi berdasarkan koridor kebijakan standar pelayanan yang telah disusun.

Hal ini dipertimbangkan untuk mengejar kebutuhan peningkatan fasilitas dan mutu pelayanan mandiri di Kota Lhokseumawe seiring peningkatan kompetisi dengan sarana-sarana kesehatan swasta yang berada dalam wilayah Kota Lhokseumawe seperti: RS Sakinah, RS Bunda, RS Melati, dan beberapa Rumah Sakit lainnya serta praktek Bidan/ Dokter lainnya yang mengadakan tindakan professional.

Kebutuhan Tenaga Medis di Kota Lhokseumawe masih perlu dilakukan penambahan seperti Dokter spesialis agar perbandingan antara jumlah pasien yang tertangani dengan Dokter dapat sebanding sehingga

pelayanan kesehatan menjadi optimal. Begitupun rujukan yang diberikan Puskesmas untuk masyarakat umum dan khusus bagi keluarga miskin perlu dilakukan pendataan sehingga *missing* data untuk kasus rujukan dapat teratasi.

**b. PHBS dan Kesehatan Lingkungan**

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ditandai dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan, pola makan seimbang dan bergizi serta aktifitas olahraga. Selain itu pula sarana penunjang PHBS di Gampong-Gampong seperti MCK, tempat sampah, drainase lingkungan serta lapangan olahraga masyarakat perlu ditingkatkan kualitasnya. Tantangan bidang kesehatan selain terkait dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat juga terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.

**1.3.1.6 Isu Strategis Infrastruktur dan Tata Ruang**

Isu strategis infrastruktur dan tata ruang adalah pembangunan Gampong, *millenium development goals*, Standard Pelayanan Minimal, reformasi birokrasi, Ruang Terbuka Hijau, cagar budaya, pusat pelayanan baru, mitigasi bencana, permukiman tidak layak huni dan pengadaan air bersih.

**a. Peningkatan infrastruktur sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**

Dalam struktur ruang nasional sebagaimana diatur dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN ditetapkan bahwa Kota Lhokseumawe sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) yang berada di Provinsi Aceh. Sebagai PKN, maka Kota Lhokseumawe perlu tersedia prasana dan sarana yang memadai sebagai Pusat Pelayanan bagi wilayah pendukungnya (*hinterland*) antara lain wilayah Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur.

Ketersediaan infrastruktur sebagai Pusat Pelayanan telah ada, baik yang terletak di wilayah Kota Lhokseumawe maupun di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Ketersediaan infrastruktur tersebut antara lain adanya Pelabuhan Laut, Bandar Udara, Jaringan Jalan Nasional, dan Perguruan Tinggi. Pelabuhan Laut terdapat di Kabupaten Aceh Utara yaitu di Krueng Geukeuh (Kecamatan Dewantara) sedangkan Pelabuhan Laut yang berada di Kota Lhokseumawe yaitu di Blang Lancang (Kecamatan Muara Satu), dan Pelabuhan Bahan Bakar Minyak di Hagu Tengah (Kecamatan Banda Sakti). Didukung pula oleh adanya Bandar Udara Malikussaleh di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Adanya jaringan jalan *Highway* (Bebas Hambatan) dan jaringan rel kereta api yang melintas Kota Lhokseumawe. Selain itu telah ada pelayanan pendidikan mulai dari tingkat Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi (PTN dan PTS).

**b. Pembangunan Gampong (APBDes)**

Pembangunan Gampong dilaksanakan dengan mengakomodasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan di tiap-tiap wilayah (Gampong) dan didukung partisipasi seluruh warga Gampong dengan menerapkan konsep pembangunan swadaya masyarakat dan gotong royong. Pembangunan dengan menggunakan wilayah Gampong sebagai satuan wilayah pengembangan memiliki keuntungan tersendiri bagi Kota Lhokseumawe. Hal ini disebabkan masyarakat dalam suatu Gampong yang merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan memiliki ikatan batin yang lebih tinggi sehingga prinsip gotong royong pun dapat digunakan dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan berbasis Gampong harus didasari oleh prinsip gotong royong mencakup aspek fisik maupun non fisik.

**c. *Millenium Development Goals (MDGs)***

*Millennium Development Goals (MDGs)* merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional yang memuat 8 (delapan) tujuan yang diupayakan untuk dicapai setiap negara anggota PBB pada tahun 2015. Ke-delapan tujuan tersebut merupakan tantangan-tantangan

utama yang bersifat krusial dalam pembangunan di seluruh dunia yang terdiri dari:

- Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat;
- Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang;
- Mempromosikan kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan;
- Menurunkan kematian anak;
- Meningkatkan kesehatan maternal;
- Melawan penyebaran HIV/ AIDS, dan penyakit kronis lainnya (malaria dan tuberkulosa);
- Menjamin keberlangsungan lingkungan;
- Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Pencapaian tujuan-tujuan MDGs ini menjadi isu strategis dalam berbagai bidang pembangunan saat ini terutama dalam bidang perencanaan kota termasuk di Kota Lhokseumawe. Perencanaan Kota yang dilakukan dengan berorientasi pada pencapaian kedelapan tujuan MDGs akan menyebabkan kualitas sumber daya manusia perkotaan menjadi meningkat dan pada akhirnya dapat membawa *multiplier effect* berupa kemajuan dalam berbagai bidang.

**d. Standart Pelayanan Minimal (SPM)**

SPM sangat dibutuhkan dalam pembangunan bidang infrastruktur dan tata ruang, dengan memperhatikan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal maka pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun Kota Lhokseumawe belum memiliki Standard Pelayanan Minimal (SPM) untuk standar kerja bidang infrastruktur dan tata ruang, kedepan akan disusun SPM tersebut untuk dipedomani dalam pembangunan bidang infrastruktur dan tata ruang. Standar Pelayanan Minimal bidang penyediaan infrastruktur meliputi sumber daya air, jalan, air minum, penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan), penanganan permukiman kumuh perkotaan, penataan bangunan dan lingkungan dan jasa konstruksi.

**e. Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Lhokseumawe pada tahun 2011 telah mencapai 9,35% dengan luas taman dan hutan Kota sebesar 1.278,31 Ha, dimana 17,96% merupakan RTH publik. Sesuai draf Rencana Tata Ruang RTH Publik direncanakan sebesar 21,72% atau 3.932,03 Ha yang terdiri dari taman dan hutan kota sebesar 3.336,51 Ha, RTH jalur hijau jalan sebesar 3,98 Ha dan RTH fungsi tertentu sebesar 591,54 Ha.

**f. Pusat-pusat pelayanan baru**

Perkembangan Kota Lhokseumawe tidak terlepas dari aktifitas yang terdapat di Kecamatan Banda Sakti sebagai pusat Kota Lhokseumawe. Kegiatan yang terdapat di Kecamatan Banda Sakti terdiri dari berbagai macam antara lain pusat Pemerintahan Kota, perdagangan, pendidikan, kesehatan, permukiman. Dalam perkembangan selanjutnya, Kecamatan Banda Sakti memiliki keterbatasan lahan dan penyediaan pelayanan yang akan menimbulkan permasalahan perkotaan (kepadatan permukiman, kemacetan, penurunan mutu sanitasi lingkungan, dan lain-lain). Pada sisi lain, wilayah selain Kecamatan Banda Sakti (Kecamatan Blang Mangat, Muara Dua, Muara Satu) terdapat lahan yang belum dimanfaatkan. Selain itu untuk memberikan pemerataan pembangunan ke wilayah Kecamatan lainnya di Kota Lhokseumawe. Dengan demikian perlu adanya pengembangan kegiatan perkotaan pada wilayah selain Kecamatan Banda Sakti.

**g. Mitigasi Bencana**

Kota Lhokseumawe merupakan wilayah yang memiliki kerawanan terhadap bencana, antara lain gempa bumi, tsunami, abrasi/ gelombang pasang, dan banjir. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai kawasan rawan bencana di Kota Lhokseumawe antara lain sebagai berikut :

- **Gempa Bumi**

Kota Lhokseumawe secara umum merupakan wilayah rawan bencana gempa bumi sebagaimana yang telah terjadi di Provinsi Aceh pada

tahun 2004. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kedudukan tektonik aktif di patahan yang diakomodasikan oleh gerak *convergent* miring Lempeng Hindia Australia dan Lempeng Sunda, dan patahan geser *dextral* memanjang di sepanjang Bukit Barisan. Sehingga dalam pembangunan infrastruktur perlu memerhatikan ketahanan terhadap gempa bumi.

- **Tsunami**

Sebagian dari wilayah Kota Lhokseumawe yang berbatasan dengan laut (Selat Malaka), khususnya Kecamatan Banda Sakti. Dengan mempertimbangkan terjadinya gempa bumi yang disusul oleh tsunami pada tahun 2004, memberikan bukti bahwa wilayah Kota Lhokseumawe di sekitar pantai merupakan kawasan yang rawan bencana tsunami. Dalam pengembangan Kota Lhokseumawe khususnya pada wilayah pantai sangat dianjurkan untuk mempertimbangkan faktor keselamatan dari bahaya bencana tsunami ini.

- **Abrasi/ Gelombang Pasang**

Pada wilayah Kota Lhokseumawe berbatasan dengan laut (Selat Malaka) khususnya Kecamatan Banda Sakti merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana abrasi/ gelombang pasang. Walaupun telah dilakukan pembangunan tanggul penahan gelombang akan tetapi belum maksimal untuk menahan tekanan gelombang laut terutama pada musim pasang naik. Perlu adanya penanganan untuk mengurangi tekanan gelombang laut sehingga dapat mempertahankan wilayah pantai dari bahaya abrasi.

- **Banjir**

Pada wilayah Kecamatan Banda Sakti merupakan kawasan yang rawan terhadap bencana banjir. Hal ini dikarenakan morfologi wilayah ini yang relatif datar. Selain itu kondisi saluran drainase wilayah ini belum terintegrasi dengan waduk pengendali banjir (*reservoir*) yang dibangun di Pusong.

memiliki rumah yang layak terutama bagi masyarakat yang berada pada wilayah kumuh atau masyarakat kaum dhuafa. Untuk tahun 2013 Pemerintah Aceh memyisihkan 10 persen dari total dana otonomi khusus Kabupaten/ Kota untuk pembangunan rumah layak huni. Sedangkan Kota Lhokseumawe hampir setiap tahunnya mengalokasikan bantuan untuk pembangunan atau perbaikan rumah kaum dhuafa. Diharapkan kedepan dengan banyaknya anggaran untuk pembangunan rumah layak huni atau rumah untuk kaum dhuafa dapat menanggulangi penataan terhadap wilayah kumuh.

Hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi sanitasi, drainase, jalan Gampong, pengolahan limbah, pertamanan untuk mewujudkan rumah layak huni dan lingkungannya.

#### **h. Pengadaaan air bersih**

Pengadaan air bersih di Kota Lhokseumawe dibedakan menjadi air bersih sistem perpipaan dan non perpipaan. Masyarakat Kota Lhokseumawe lebih banyak mengakses air bersih non perpipaan. Metode lain yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya adalah dengan mengandalkan sumur pompa. Sumber air bersih lainnya yang digunakan oleh masyarakat adalah PAH (Penampungan Air Hujan).

#### **1.3.1.7 Isu Strategis Lingkungan Hidup**

Merujuk pada isu-isu global, baik yang tercantum pada *MilleniumDevelopment Goals* (MDGs), terdapat beberapa isu lingkungan penting di Kota Lhokseumawe yang selaras dengan isu-isu global, dan harus mendapat perhatian lebih. *Goal* ke-7 MDGs menyebutkan tentang *Ensure Environmental Sustainability*, atau jaminan keberlanjutan lingkungan. *Goal* atau tujuan ke-7 MDGs tersebut memiliki target untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam program dan kebijakan negara, dan mengembalikan sumber daya yang hilang.

#### **a. Sistem Pengelolaan Sampah**

Secara umum untuk menangani sampah perlu dilakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh

tercampurnya segala jenis sampah mulai dari sumber. Sampah basah maupun sampah kering tercampur jadi satu dan ditimbun begitu saja sampai diambil oleh petugas kebersihan. Selain itu pencampuran antar jenis sampah juga terjadi akibat kegiatan pemulung/ perangkas ketika mengambil barang bekas yang masih bernilai di timbunan sampah. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi yang dimulai dari kesadaran masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah tangga merupakan kunci pembuka permasalahan pengelolaan sampah dan sampah plastik pada khususnya.

**b. Sistem Pengelolaan Air Limbah**

Kapasitas sumber daya manusia yang terkait dalam pengelolaan Air Limbah Permukiman perlu ditingkatkan dengan melalui sosialisasi pengelolaan Air Limbah Permukiman sehingga masyarakat sadar akan pentingnya pengelolaan Air Limbah Permukiman. Peningkatan penyelenggaraan pengembangan sistem Air Limbah Permukiman yang berbasis masyarakat serta pentingnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat

---

#### **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN LKj IP 2017**

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Siklus SAKIP Kota Lhokseumawe diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang merupakan Rencana Strategis Lima Tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

RPJPD Pemerintah Kota Lhokseumawe ditetapkan Qanun Nomor 4 Tahun 2014, sedangkan RPJMD Kota Lhokseumawe ditetapkan dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2015. RPJMD mendefinisikan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis SKPD. Untuk menguraikan lebih detail perencanaan dalam RPJM, disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana kerja ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. SAKIP dibangun dan dikembangkan juga dalam rangka menilai capaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang kemudian dikomunikasikan kepada *stakeholder* Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam bentuk LKj IP.

Esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kota Lhokseumawe. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kota untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis pemerintah Kota dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

LKj IP memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai sarana bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai sarana evaluasi keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian kinerja pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKj IP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP oleh setiap instansi pemerintah

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj IP 2017 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kota Lhokseumawe atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2017. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2017.

- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKj IP 2017 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kota Lhokseumawe bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kota Lhokseumawe dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

## **1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

---

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe selama Tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) 2017 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

Sistematika penyajian LKj IP Kota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Kondisi Geografis
- 1.2 Potensi Ekonomi
- 1.3 Analisis Isu – Isu Strategis
- 1.4 Maksud dan Tujuan LKj IP 2017
- 1.5 Sistematika Penyajian

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- 2.1 Perencanaan Strategik Pemerintah Kota Lhokseumawe
- 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2017
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja
  - 3.1.1 Perbandingan Pencapaian Sasaran Tahun 2016 dan Tahun 2017

3.1.2 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

3.1.3 Perbandingan Capaian Tahun 2017 dengan Standar Nasional (SPM)

3.2 Aspek Keuangan

#### **BAB IV PENUTUP**

#### **DAFTAR TABEL**

#### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**